

REFORMASI POLA PENGEMBANGAN GURU MENYONGSONG ERA GLOBALISASI DAN OTONOMI

Slamet Suyanto¹

ABSTRAK

Munculnya Indonesia baru sesuai tuntutan era reformasi ditandai dengan perubahan yang sangat besar di semua bidang, baik bidang politik, social, ekonomi, maupun budaya. Terlebih dengan adanya era kesejagatan dimana nilai-nilai universal menjadi semakin kuat membumi. Perubahan bidang-bidang tersebut membuka cakrawala baru di bidang pendidikan karena pendidikan sangat terkait dengan kultur dan budaya bangsa yang semakin terbuka oleh nilai-nilai global.

Perubahan nilai-nilai pendidikan akan berpengaruh terhadap institusi dan pelaku pendidikan, utamanya guru. Oleh karena itu para calon guru perlu dipersiapkan sedemikian rupa sehingga mampu menghadapi era globalisasi dan otonomi.

Pola penyiapan guru orde lama diganti dengan model baru yang lebih baik. Pola penyiapan guru model lama bersifat apprenticeship. Calon guru hanya belajar dari seorang guru dalam waktu singkat. Model tersebut tidak cukup memberi bekal para calon guru untuk membentuk pribadi guru dalam dirinya. Model tersebut diganti dengan model pengembangan guru berbasis sekolah yang dikenal dengan School-Based Teacher Education (SBTE). Pada SBTE para calon guru diperkenalkan dengan sekolah sedini dan selama mungkin dengan calon habitatnya yaitu sekolah.

PENDAHULUAN

LPTK sebagai lembaga penghasil tenaga kependidikan menghadapi paling tidak tiga dilema besar untuk menghasilkan guru yang berkualitas. Pertama, kualitas masukan (input). Banyak mahasiswa masuk LPTK sebagai pilihan kedua. Karena tidak diterima di universitas sebagai pilihan pertama, mereka masuk LPTK. Para lulusan sekolah menengah yang ber NEM tinggi pada umumnya tidak mau masuk LPTK sehingga kualitas input LPTK rendah. Hal itu antara lain disebabkan karena profesi guru kurang prospektif.

Faktor kedua ialah rendahnya penghargaan terhadap profesi guru. Di tahun 60-an orangtua konon menasehati anak gadisnya begini, "Nduk, kamu belajar yang baik,

¹ Penulis adalah dosen jurusan Pendidikan Biologi, FMIPA, UNY

jadi anak yang rajin, jaga kebersihan, hormat, sopan dan santun agar kamu dapat suami guru”. Begitu cerita salah seorang senior saya. Hal itu tampaknya telah menjadi legenda, kenangan manis yang terasa amat pahit sekarang. Kini, jika ada gadis cantik ditaksir oleh guru ia akan berpikir seribu kali. Barangkali satu dari seratus yang langsung berkata “Ya..ya..ya”, seperti iklan KB lingkaran biru. Hal itu menunjukkan betapa jeleknya nasib Si Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Oleh karena itu guru sebagai profesi perlu diperjuangkan profesionalismenya, termasuk gajinya. Rendahnya gaji guru membuat para lulusan sekolah menengah yang berkualitas enggan masuk LPTK untuk menjadi guru.

Ketiga, pola penyiapan guru tidak memberi bekal yang cukup tentang persekolahan. Para calon guru berlatih mengajar di sekolah selama dua bulan. Waktu dua bulan tidak cukup bagi para calon guru untuk merefleksikan hasil praktiknya di sekolah. Para guru baru pada umumnya memerlukan waktu 1-2 tahun untuk adaptasi dengan kondisi sekolah dan profesinya.

Faktor pertama dan kedua sangat ditentukan oleh kemampuan dan penghargaan pemerintah dan masyarakat terhadap profesi guru. Oleh karena itu faktor yang sekiranya dapat diubah oleh LPTK ialah factor ketiga yaitu pola penyiapan guru agar dapat meningkatkan kualitas para calon guru.

TANTANGAN GURU DI ERA GLOBALISASI DAN OTONOMI

Era reformasi dan globalisasi di Indonesia menuntut perubahan yang cepat dan mendasar di berbagai aspek kehidupan bangsa, baik aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya. Perubahan tersebut antara lain mengarah pada pengembangan nilai-nilai demokrasi, otonomi, dan transparansi yang berlaku untuk semua bidang, termasuk bidang pendidikan..

Pengaruh era globalisasi di bidang pendidikan antara lain tampak dengan semakin kuatnya tuntutan nilai-nilai, norma, dan kemampuan universal melalui pendidikan global (*global education*). Empat Pilar Pendidikan Glo

Pillars of Global Education) dari UNESCO (dalam Margot,1999) antara lain mengisyaratkan bergesernya nilai pendidikan yaitu tidak berhenti pada aspek kognisi tetapi diteruskan ke aspek nilai dan sikap yang tidak hanya dapat diterima oleh lingkungannya, tetapi juga oleh masyarakat dunia. Pendidikan tidak sekedar membuat siswa tahu atau pandai, tetapi membentuk manusia yang mampu menjalankan kehidupan bermasyarakat yang bermoral dan berbudaya dalam skala lokal, regional, maupun global. Oleh karena itu 4 Pilar Pendidikan Global hendaknya dianggap sebagai satu kesatuan yang sekuensial: *Learning to know, Learning to be, Learning to do, dan Learning to live together.*

Otonomi di bidang pendidikan yang dulu hilang perlu bangun agar lembaga pendidikan dapat berkembang menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam kacamata “*social constructivism*”, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik bangsa Indonesia menjadi bangsa yang madani, demokratis, berkepribadian, berbudaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sejajar bangsa-bangsa maju.

Tidak berkembangnya pendidikan di sekolah selama ini antara lain disebabkan oleh budaya yang memposisikan sekolah dan guru sebagai “buruh” pelaksana pendidikan yang dianggap tidak perlu mengerti arah kebijakan pendidikan itu sendiri. Ia bekerja di sekolah, tetapi ia tidak memiliki sekolah. Ia berada diantara siswa, tetapi tidak pernah memiliki siswa. Ia menenteng, mempelajari, dan melaksanakan kurikulum, tetapi ia tidak pernah merasa memilikinya; persis seperti buruh tani yang tidak memiliki lahan. Oleh karena itu di masa mendatang posisi guru perlu diubah dari kelas “buruh” menjadi “majikan” di sekolahnya.

Otonomi sekolah, melalui manajemen berbasis sekolah atau *School-based Management* (SBM) diharapkan dapat mengubah guru menjadi “majikan”. Guru dan

sekolah diharapkan mandiri dan merdeka, mampu mengurus dirinya sendiri, mengembangkan pendidikan; mengembangkan kurikulum, program unggulan, bahkan sampai sistem nilai. Kewenangan sekolah dan guru untuk mengembangkan pendidikan terbuka luas. Persoalannya ialah apakah sekolah dan guru mampu menggunakan SBM sebaik-baiknya? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan sangat ditentukan oleh kemampuan guru.

Era otonomi dan globalisasi merupakan tantangan yang besar bagi guru dan sekolah. Sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan SDM yang kualitasnya diakui tidak hanya secara lokal, tetapi juga regional dan internasional. Pengakuan akan kualitas SDM oleh dunia internasional semakin dibutuhkan. Sebagai contoh, jika lulusan SMU Indonesia akan melanjutkan ke PT (perguruan tinggi) di Australia, maka ia harus menempuh program matrikulasi selama 1 tahun yang biayanya (termasuk tiket, *tuition fee* dan biaya hidup) dapat mencapai ratusan juta rupiah. Sebaliknya lulusan SMU dari Pilipina tidak melalui matrikulasi, langsung mengikuti program *degree* yang diinginkan.

Kasus serupa akan banyak dijumpai manakala kita berbicara tentang ketenagakerjaan dimana tenaga kerja kita tidak diakui profesionalismenya setara dengan tenaga kerja dari negara lain. Hal-hal di atas menunjukkan kuatnya pengaruh nilai-nilai global yang harus diantisipasi oleh dunia pendidikan, termasuk sekolah dan guru.

Ironisnya banyak sekolah, guru dan pelaksanaan pendidikan lainnya tidak banyak atau lambat sekali berubah. Banyak guru yang telah mengajar lebih dari dua puluh tahun menggunakan materi, metode, pendekatan bahkan buku yang sama. Setelah mempelajari pendidikan di sekolah dasar dan menengah puluhan tahun, Cuban (1983:175) mengungkapkan fakta itu sebagai berikut:

“... a dominant core of teaching practices has endured since the turn of the century in both elementary and secondary school classrooms. These practices (teaching the whole group, reliance upon a textbook, rows of desks, question-answer...) persisted over time, in different settings...)”

Sekolah di negara kita tampaknya juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Cuban. Hasil penelitian Dakir, dkk. (1999) mengungkapkan minimnya buku-buku selain buku paket di SD. Kondisi perpustakaan di SD pada umumnya miskin akan buku referensi, apalagi yang berbahasa asing. Guru mengajar materi sesuai buku paket, ditambah dengan 2-3 buku tambahan yang mirip buku paket. Meja-kursi ditata permanen dalam baris, persis seperti jaman Belanda dulu. Kelas tampak bersih dari gambar, skema atau karya siswa; mungkin disesuaikan dengan semboyan 5K yang salah satunya ialah Kebersihan. Begitupula proses pembelajarannya tidak banyak perubahan. Dua pertiga waktu di sekolah dihabiskan oleh guru untuk bicara. Banyak sekolah menggunakan “Hukum MD”, alias murid diterangkan dan guru menerangkan.

Begitu gemasnya Ivan Illich terhadap kondisi sekolah (dan institusi masyarakat) yang pro status quo hingga ia melontarkan kritik yang tajam. Menurutnya banyak “plesetan” di dunia pendidikan kita. Misalnya menerangkan materi pelajaran dikatakan mendidik, sedangkan membaca buku dikatakan belajar. Kegemasan Illich dituangkan dalam bukunya *Deschooling Society* (1983). Menurutnya meskipun biaya sekolah terus naik dan mahal, pada umumnya anak tidak belajar secara signifikan dari sekolah, tetapi belajar dari masyarakat secara alami. Ia mengatakan, “...But most people acquire most of their knowledge outside school... Most learning happens casually, and even most intentional learning is not the result of programmed instruction”.

Dengan adanya berbagai tuntutan era reformasi dan globalisasi maka lembaga pendidikan, termasuk guru dan sekolah dituntut untuk tanggap terhadap perubahan yang amat cepat. Sekolah tidak dapat terus menaikkan SPP tanpa menaikkan kualitas servisnya. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih kompleks untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. Di samping gaji memadai, guru harus memiliki figur pemimpin, pamong dan pendidik yang dapat menjadi contoh bagi siswa. Selain itu guru perlu memiliki kemampuan manajerial dan memiliki perspektif global, utamanya tentang perubahan masyarakat global, perkembangan ilmu, dan penggunaan teknologi untuk berbagai kepentingan, khususnya untuk kepentingan pembelajaran.

Untuk memperoleh guru yang memiliki kualifikasi yang demikian itu maka pola penyiapan guru di LPTK perlu diperbaiki. Ada beberapa pertanyaan penting yang perlu kita jawab bersama. Apakah benar pola pengembangan guru yang kita miliki cukup modern untuk menghadapi era globalisasi dan otonomi? Apakah benar pola yang kita miliki mampu menghasilkan calon guru yang sesuai dengan kebutuhan sekolah pada era modern ini? Kalau dibandingkan dengan pola pengembangan guru di negara lain posisi kita dimana? Pola pengembangan guru yang bagaimana yang akan kita pakai kedepan?

EMPAT POLA PENGEMBANGAN GURU

Meskipun tujuan dan hakekatnya tidak berubah secara drastis, paling tidak ada empat pola penyiapan guru (*Teacher Education*) sepanjang sejarah. Dengan mengetahui ke-empat pola tersebut kita dapat mengambil beberapa manfaat. Pertama untuk mengetahui dimana posisi pola pengembangan guru kita sekarang ini. Kedua

untuk menentukan pola penyiapan guru yang akan kita kembangkan. Keempat pola pengembangan guru tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Competence-based Teacher Education (CBTE)**

CBTE telah dipikirkan sejak tahun 1940-an, tetapi berkembang awal tahun 70-an. Model penyiapan guru melalui CBTE menekankan adanya latihan terhadap aspek-aspek yang dipercayai sebagai kemampuan guru. Berbagai kompetensi guru diidentifikasi, kemudian dilatihkan kepada para calon guru. Kita dulu mengenal 10 kompetensi guru yang kemudian dilatihkan kepada mahasiswa antara lain melalui Pengajaran Mikro (*Micro-teaching*).

Model tersebut memiliki kelebihan ialah adanya kemampuan yang jelas dari para calon guru yang dihasilkan oleh suatu LPTK. Agar CBTE berjalan baik maka LPTK harus memiliki **standar kompetensi guru**. Jika kita menganut *Outcomes-based Teacher Education* seperti yang dijelaskan oleh Spady (1993) atau *Competency-Based Standard (CBS)* menurut definisi Marsh (1996) maka LPTK harus memiliki standar lulusan. Pentingnya standar kompetensi lulusan dinyatakan oleh Burrow (1993:111) sbagai berikut:

“...to define and promote its richness and complexcity, and hence to establish standards by which we can guarantee our students quality assurance”.

Dengan adanya standar lulusan para calon guru, maka setiap kegiatan perkuliahan berorientasi pada standar tersebut, mengembangkan kemampuan mahasiswa menuju standar yang telah ditetapkan. Di samping itu para pemakai lulusan LPTK memiliki “garansi” akan kemampuan lulusan tersebut. Sayangnya LPTK termasuk UNY belum memiliki standar kompetensi yang dimaksud.

Berbeda dengan di Australia, tepatnya di Victoria, standar kompetensi guru telah ditetapkan dan dibedakan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan guru.

Standar kompetensi guru baru (*the beginning teachers*) berbeda dan lebih sederhana dibanding dengan standar kompetensi guru yang lebih senior (*experienced teachers, leading teachers, assistant principals, dan principals*) (Slamet Suyanto, 1997). Standar kompetensi guru merupakan acuan dan arah untuk mengembangkan para calon guru. Kurikulum dan kegiatan perkuliahan harus mengembangkan kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan.

Model CBTE sekarang dianggap kuno karena kompetensi guru berkembang terus. Ada universitas di Amerika Serikat yang membuat daftar kompetensi tersebut sampai 3000. Tentu akan merepotkan sekali jika LPTK harus melatih 3000 kompetensi guru. Kritik lain terhadap SBTE ialah bahwa kemampuan yang dilatihkan tidak selamanya cocok dengan keadaan yang sebenarnya di sekolah. Ada banyak hal yang tidak bisa dilatihkan di LPTK, tetapi harus dialami sendiri oleh para calon guru agar menumbuhkan citra guru dalam dirinya. Misalnya perasaan menatap siswa pada saat berada di depan kelas, membantu siswa yang mengalami kesulitan, atau ketika berhadapan dengan siswa yang “nakal”. Semua itu tidak dapat sekedar diceritakan tetapi harus dirasakan. Seperti halnya orang makan, tidak akan orang merasa nikmat atau kenyang hanya dari cerita tentang makanan.

2. Performance-based Teacher Education (PBTE)

PBTE telah dipikirkan tahun 1960-an, tetapi baru banyak dipakai awal tahun 1970-an. Untuk melihat apakah kompetensi yang dilatihkan benar-benar dikuasai para calon guru maka perlu ditampilkan pada forum pembelajaran yang riil. Oleh karena itu muncullah PBTE. Kita memiliki PBTE yaitu dengan adanya PPL. Mahasiswa praktik mengajar di sekolah/kelas selama dua bulan. Mereka di

evaluasi (di *assess*) dengan menggunakan evaluasi penampilan (*performance evaluation*) yang disebut Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Melalui program Kemitraan APKG I, II, dan III telah dikembangkan untuk mengukur penampilan para calon guru (Djemari, dkk., 1999).

3. Experience-based Teacher Education (EBTE)

Perkembangan selanjutnya dari pola PBTE ialah SBTE. Pada pola tersebut para calon guru diberi pengalaman konkrit mengajar di sekolah. Para calon guru dituntut untuk dapat merefleksikan hasil pengalaman mengajarnya di sekolah agar dapat memiliki citra seorang guru.

Pada pola EBTE para calon guru dicangkokkan di sekolah. Proses tersebut dapat pula dianggap sebagai sistem magang. Fungsinya ialah memberi bekal pengalaman kepada para calon guru tentang persekolahan sebelum ia diangkat sebagai guru. Kegiatan Pasca PPL yang mirip sistem cangkok, seperti yang dicanangkan oleh Mohamad Slamet (1999) belum dapat berjalan oleh adanya berbagai kendala. Kegiatan PPL yang hanya dua bulan tidak cukup bagi mahasiswa untuk merefleksikan hasil pengalaman persekolahannya menjadi bagian internal dalam dirinya sebagai calon guru.

Salah satu kritik dan keberatan terhadap sistem cangkok para lulusan LPTK tidak dapat langsung bekerja, tetapi harus magang lebih dahulu. Berarti ada waktu yang hilang sebagai *waiting time* yang berarti juga pemborosan.

4. School-based Teacher Education (SBTE)

SBTE sudah mulai digunakan di Amerika Serikat dan Inggris sejak tahun 70-an. Di Australia baru mulai dilakukan pada awal tahun 80-an. SBTE memandang pentingnya sekolah sebagai basis pengembangan guru. Para calon

guru diperkenalkan dengan sekolah sebagai habitatnya sedini mungkin dan berlangsung terus sampai akhir perkuliahan. Dengan cara seperti itu mahasiswa senantiasa dapat menghubungkan teori yang dipelajari di kampus dengan fenomena riil di sekolah. Mahasiswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari di kampus.

Dengan terjun di sekolah diharapkan para calon guru mengenal seluk beluk sekolah dan segenap persoalannya dengan baik. Begitu ia menjadi guru ia sudah benar-benar siap karena sudah mengenal dengan baik persoalan pendidikan di sekolah. Hal ini dipandang lebih menguntungkan dari kegiatan magang, karena begitu lulus para calon guru dapat langsung bekerja di sekolah.

Keberhasilan SBTE sangat ditentukan oleh kerjasama yang baik antara LPTK dengan sekolah. Perasaan bahwa kehadiran mahasiswa calon guru di sekolah sebagai hal yang mengganggu kegiatan sekolah harus dihilangkan. Sekolah dan guru harus memandang bahwa pengalaman keguruannya perlu diwariskan kepada para calon guru. Oleh karena itu SBTE hanya dapat dilakukan dengan adanya program kemitraan yang baik antara sekolah dengan LPTK.

Hubungan kemitraan LPTK-sekolah telah dikembangkan dengan baik di negara-negara maju. Pada tahun 1974, University of Houston, Texas misalnya dinyatakan sebagai pusat pengembangan guru (*Continuing Teacher Professional Development*). Dengan demikian hubungan antara LPTK dengan sekolah amat baik. Para guru mendapat tambahan ilmu dari universitas, dan universitas dapat menitipkan para mahasiswa kepada para guru.

Di Australia (Victoria) hubungan universitas dengan sekolah digalang melalui *Professional Partnership Program* (PPP) yang tujuannya untuk mengembangkan kualitas pembelajaran dan kemitraan, seperti yang diungkapkan

oleh Baker, Scaley dan Hutchins (dalam Slamet Suyanto, 1997: 21) sebagai berikut:

“The PPP provides a structure that encourage the staff from both the university and schools to collaborate in the development, implementation, and evaluation of the practicum program, whilst simultaneously developing viable professional development links between individual within school and the university”

PPP kemudian diperkuat lagi dengan berbagai proyek lanjutan, seperti NPQTL (*National Project of the Quality of Teaching and Learning*) dan NPDP (*National Professional Development Program*). Hal itu menunjukkan begitu pentingnya kemitraan antara sekolah dengan universitas.

MODEL PENGEMBANGAN GURU DI INDONESIA

Model pengembangan guru di Indonesia masih bersifat *apprenticeship*. Para calon guru belajar mengajar dari seorang guru di sekolah. Ia tidak berkesempatan untuk observasi guru-guru lain dari berbagai bidang studi. Sering para calon guru mencoba meng-copy cara mengajar dari guru tersebut. Tentu saja hasilnya tidak dapat sebaik aslinya karena pada hakekatnya setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda.

Mata kuliah yang secara langsung memperkenalkan para calon guru dengan sekolah amat sedikit. Mata kuliah kependidikan sekitar 12%, sedangkan di Deakin University mencapai 50%. Baru matakuliah PPL dan Pengajaran Mikro yang didesain secara khusus dan terpadu untuk mengembangkan calon guru. Sementara matakuliah yang lain seperti Pendidikan Agama, Pancasila, dan matakuliah bidang studi belum jelas peranannya. Sementara itu mata kuliah yang seharusnya menjadi “*core*” pengembangan calon guru, seperti Psikologi Pendidikan, Perkembangan Anak Didik, Teknologi Pembelajaran, dan lainnya belum kompak mengikuti satu pola bersama.

Agar pengembangan guru mengikuti satu pola yang jelas, maka LPTK perlu memiliki standar kompetensi (calon) guru. Standar kompetensi tersebut dapat menjadi buku panduan perkuliahan dan diberikan mahasiswa saat registrasi awal. Misalnya, salah satu butir dari standar tersebut berbunyi “setiap calon guru lulusan UNY mahir menggunakan komputer untuk kegiatan pembelajaran”, maka ada satu bagian dari setiap matakuliah dimana mahasiswa diperkenalkan dengan komputer. Secara lebih spesifik mungkin perlu ada matakuliah Komputer untuk Pembelajaran.

Pola pengembangan guru di LPTK, khususnya UNY belum sepenuhnya mengikuti SBTE. Mahasiswa tidak diperkenalkan dengan kegiatan sekolah dari semester 1 dan diteruskan sampai semester 8. Sebenarnya usaha ke arah SBTE sudah ada, namun belum terlaksana secara penuh. Usaha tersebut diwujudkan dengan adanya pola PPL baru yang bertahap dan bersinambung, yaitu Pra PPL I, Pra PPL II, PPL, dan Pasca PPL (Mochamad Slamet, 1999).

Pengajaran Mikro ala UNY mendapat kritik tajam jika menggunakan pola SBTE. Pada SBTE, mahasiswa mendapat peluang lebih banyak terjun di kelas. Kadang mahasiswa membantu siswa atau kelompok kecil, atau menerangkan satu bagian kecil dari topik yang diajarkan guru. Mengambil peran kecil dalam pembelajaran seperti tersebut disebut *micro-teaching*. Meskipun peran tersebut kecil, namun dianggap sangat berarti karena berada pada konteks pembelajaran yang sebenarnya. Sedangkan *micro-teaching* milik kita disebut *peer teaching* yang seharusnya lebih bersifat klinis.

Masih banyak kendala untuk melakukan SBTE secara penuh. Kendala tersebut antara lain ialah belum siapnya mental mahasiswa semester I (karena banyak mahasiswa yang masuk program keguruan sebagai pilihan kedua), belum baiknya

manajemen kerjasama sekolah-LPTK, banyaknya matakuliah yang harus ditempuh, dan adanya rasa keberatan sekolah bila sering kedatangan mahasiswa.

ALTERNATIF MENGATASI MASALAH

Seperti telah dijelaskan di muka, SBTE memerlukan hubungan yang harmonis antara LPTK, Kanwil, dan sekolah. MOU (*Memorandum of Understanding*) yang telah dibuat bersama perlu diwujudkan secara nyata. Hubungan formal institusional antar lembaga tersebut perlu dikembangkan menjadi hubungan informal personal melalui kemitraan.

Program Kemitraan yang dicanangkan tahun 1996 antara LPTK, Kanwil dan sekolah perlu dikembangkan. Melalui Program Kemitraan Dalam Negeri maupun Luar Negeri berbagai kegiatan melibatkan unsur LPTK, Kanwil dan sekolah dengan universitas luar negeri telah dilaksanakan, seperti penelitian tindakan kelas, penulisan karya ilmiah, dan penerbitan jurnal. Di samping itu diadakan pula pelatihan metodik khusus pembelajaran, khususnya untuk tujuh bidang studi. Para guru dan dosen juga diberi pelatihan penggunaan internet dan mencoba mengakses *home page* (Djemari, dkk. 1999; Djemari, dkk. 2000).

Namun demikian Program Kemitraan masih terbatas pada 6 sekolah mitra (3 SLTP dan 3 SMU). Oleh karena itu Program Kemitraan perlu dideseminasi ke berbagai sekolah, termasuk TK, SD, dan SMK. Kerjasama antar lembaga yang bermitra perlu ditingkatkan secara resiprokal mutualistik. Misalnya, perpustakaan UNY menyediakan ruang khusus untuk TK-SD dan SM, sehingga siswa dan guru dapat memanfaatkannya. Bersama Kanwil LPTK mendesain program-program *in-service* untuk keberlanjutan pengembangan profesi para guru. Penelitian bersama antara dosen dan guru perlu ditingkatkan, sehingga dosen sering ke sekolah dan guru

sering ke LPTK. Dengan kedekatan hubungan antara LPTK dengan sekolah, maka pengembangan guru berbasis sekolah diharapkan dapat terwujud dengan baik.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain ialah:

1. Untuk menghadapi era globalisasi dan otonomi, guru dituntut untuk memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu para calon guru perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya.
2. Ada 4 pola penyiapan guru. SBTE merupakan model pengembangan guru yang sekarang banyak dipakai; dimana sekolah merupakan basis pengembangan calon guru.
3. Untuk melaksanakan SBTE diperlukan kerjasama yang baik antara LPTK dengan sekolah.

SARAN

1. Pola penyiapan guru melalui SBTE perlu disosialisasikan baik kepada unsur LPTK, Kanwil maupun sekolah agar menumbuhkan pengertian bahwa pengembangan guru tersebut sangat potensial.
2. Untuk menjalin kemitraan LPTK dengan sekolah, LPTK perlu bekerjasama dengan Kanwil mendisain program-program untuk pengembangan profesi guru serta memberi sumbangan terhadap pengembangan sekolah. Sebagai imbalannya sekolah menyediakan peluang untuk berlatih keguruan bagi mahasiswa dan sebagai ajang pengembangan ilmu keguruan.

. DAFTAR PUSTAKA

- Burrow, S. (1993). National Competency Standards for the Teaching Profession: a hence to define the future of schooling. In *Competencies*, C. Collins, ACE, Canberra.
- Cuban, L. (1983). How did teachers teach, 1890-1980?. *Theory into Practice*, 22 (3), 150-165
- Dakir Ali, Slamet Suyanto, Sukidjo (1999). *Identifikasi Kesulitan Pembelajaran di SD se Propinsi DIY*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY.
- Djemari Mardapi, Sugeng Mardiyono, Slamet Suyanto (1999). *Laporan Program Kemitraan Dalam Negeri Tahap II: Pelatihan Dosen dan Guru Pembimbing PPL*. Yogyakarta: UNY.
- Djemari Mardapi, Sugeng Mardiyono, Slamet Suyanto (2000). *Laporan Program Kemitraan Luar Negeri Tahap II: Pengiriman Dosen dan Guru ke Universitas Luar Negeri*. Yogyakarta: UNY.
- Margot, U. (1999). *Global Education*. Makalah disampaikan pada seminar tentang Bentang Belajar (Learn Scape) tanggal 28 Desember 1999 di Lembaga Penelitian UNY.
- Marsh, C.J. (1996). *Handbook for Beginning Teachers*. Melbourne, Australia: Longman.
- Marzano, R.J., Pickering, D., McTighe, J. (1993). *Assessing Student Outcomes*,
- Mochamad Slamet (1999). *Sistem PPL Baru*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Dosen dan Guru Pembimbing PPL tanggal 20 Pebruari 1999 di P4G, UNY.
- Slamet Suyanto (1997). *Teacher Education Programs At Deakin University: Moving from apprenticeship to School-Based Experience*. A short visit report. Melbourne, Australia: CDU.
- Spady, W. (1993). Outcome-Based education. Canberra: ACSA: *Workshop Report No 5*.